



BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BAPERLITBANG
KABUPATEN KARANGANYAR

LKjIP

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
2025

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
KATA PENGANTAR	vi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Isu-isu Strategis	I-2
1.3 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran.....	I-3
1.4 Sistematika Penulisan	I-8
1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2024	I-9
1.6 Langkah Perbaikan Internal OPD.....	I-11
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	I-1
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	I-2
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025.....	I-6
2.4 Perjanjian Kinerja tahun 2025	I-9
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	I-10
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	III-1
3.2 Realisasi Anggaran	III-15
3.3 Inovasi	III-19
3.4 Penghargaan	III-19
 BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	IV-1
4.2 Rekomendasi	IV-2

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Baperlitbang tahun 2025

Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2025

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Baperlitbang tahun 2025

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Komposisi ASN dan Non ASN.....	I-3
Tabel 1.2 : Komposisi jenjang pendidikan terakhir	I-3
Tabel 1.3 : Komposisi per bidang	I-3
Tabel 1.4 : Ketersediaan Prasarana Gedung Kantor	I-4
Tabel 1.5 : Ketersediaan Perlengkapan Gedung Kantor	I-4
Tabel 1.6 : Ketersediaan Kendaraan Dinas	I-5
Tabel 1.7 : Ketersediaan Peralatan Kantor	I-5
Tabel 1.8 : Anggaran pada Perubahan APBD tahun 2025.....	I-5
Tabel 1.9 : Matriks Tindak Lanjut LHE SAKIP Baperlitbang 2024	I-10
Tabel 2.1 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPERLITBANG..	II-1
Tabel 2.2 : Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	II-2
Tabel 2.3 : Program, Kegiatan dan Subkegiatan	II-6
Tabel 2.4 : Perjanjian Kinerja Baperlitbang tahun 2025.....	II-9
Tabel 2.5 : Indikator Kinerja Program dan Anggaran Baperlitbang tahun 2025	II-9
Tabel 3.1 : Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja	III-1
Tabel 3.2 : Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis Tahun 2025	III-2
Tabel 3.3 : Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024 dan 2025	III-4
Tabel 3.4 : Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025 dan Target 2026 (Akhir RPD)	III-6
Tabel 3.5 : Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025 dengan Standar Provinsi/Nasional	III-7
Tabel 3.6 : Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan Kinerja Dan Solusinya	III-10
Tabel 3.7 : Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	III-14
Tabel 3.8 : Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan	III-16
Tabel 3.9 : Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan..	III-20

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 : Dashboard SMARTSAKIP Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar ..	II-10
Gambar 3.1 : Sertifikat Penghargaan	III-23

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Baperlitbang) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

LKjIP ini merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Melalui laporan ini, Baperlitbang menegaskan komitmennya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, serta mendukung upaya pencegahan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dengan menekankan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa keluaran (output) maupun manfaat (outcome).

Selain itu, penyusunan LKjIP bertujuan memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat pencapaian kinerja, permasalahan yang dihadapi, serta langkah perbaikan yang ditempuh dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Baperlitbang sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Baperlitbang Kabupaten Karanganyar Tahun 2024–2026. Dengan demikian, laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar penguatan perencanaan dan peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Sebagai media akuntabilitas, LKjIP ini juga menyajikan informasi mengenai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang tahun 2025. Penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Tahunan Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Baperlitbang Tahun 2025, Rencana Strategis 2024–2026, serta Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Terima kasih dan apresiasi kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya serta berkontribusi dalam penyusunan LKjIP Baperlitbang Kabupaten Karanganyar Tahun 2025, baik pimpinan, pejabat struktural dan fungsional, staf pelaksana, maupun perangkat daerah terkait yang telah memberikan dukungan data, masukan, dan koordinasi. Semoga kerja sama yang baik ini dapat terus terjaga dan menjadi penguatan bagi peningkatan kinerja serta kualitas pelayanan Baperlitbang Kabupaten Karanganyar pada masa mendatang.

Karanganyar, Februari 2026
KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH



DWI CAHYONO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730614 199303 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Tahun 2024 - 2026, pembangunan di Kabupaten Karanganyar berpedoman pada Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar dengan 6 tujuan strategis daerah salah satunya adalah ***Meningkatkan Daya Saing Daerah*** dengan salah satu sasaran daerah adalah **Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi**.

Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki 3 (tiga) landasan utama yaitu: transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan, dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, transparan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang konsisten, sinkron dengan pusat dan provinsi, realistis dan dapat dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan masyarakat atau mengatasi permasalahan / isu strategis daerah. Perencanaan dan penganggaran menjadi fungsi yang sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (BAPERLITBANG) Kabupaten Karanganyar melaksanakan 2 (dua) urusan penunjang yaitu urusan Perencanaan. dan urusan Penelitian dan Pengembangan. BAPERLITBANG merupakan unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang merupakan kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya BAPERLITBANG menentukan tujuan strategis Perangkat Daerah adalah Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi, dengan 3 sasaran strategis OPD :

1. Meningkatnya kualitas tata laksana pemerintahan;
2. Meningkatnya kualitas perencanaan daerah dan penganggaran,
3. Meningkatnya kualitas penelitian, pengembangan dan inovasi daerah.

Di era Reformasi Birokrasi peran dan kinerja suatu Perangkat Daerah sangat diperlukan, karena jalannya Pemerintahan akan baik jika setiap OPD dapat saling sinergis dan kolaboratif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Setelah melaksanakan kegiatan maka sebagai Perangkat Daerah setiap tahun wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Isu-isu Strategis

1. Di bidang perencanaan, tantangan isu strategis yang dihadapi adalah penguatan peran BAPERLITBANG sebagai koordinator penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek. Keberhasilan pembangunan dan ketepatan manfaat hasil pembangunan sangat dipengaruhi oleh akurasi dan data terbaru. Dengan demikian BAPERLITBANG bertanggungjawab untuk menarasikan data dan mempublikasikan kepada Perangkat Daerah sebagai rujukan perencanaan pembangunan daerah.
2. Di bidang penelitian dan pengembangan, tantangan isu strategis yang dihadapi adalah implementasi kebijakan-kebijakan daerah berbasis riset, dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian serta penerapan inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.3. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

1. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Baperlitbang perlu dukungan Sumber Daya Manusi (SDM) yaitu ASN maupun non ASN, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Pegawai yang terdiri dari ASN (PNS) dan Non ASN (THL), sebagai berikut :

Tabel 1.1.
Komposisi ASN dan Non ASN

No	Uraian	L	P	Jumlah
1.	ASN (PNS)	23	14	37
2.	Non ASN (THL)	9	4	13
	Jumlah.	32	16	50

Sumber : BAPERLITBANG Tahun 2025, diolah

- b. Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 1.2.
Komposisi jenjang pendidikan terakhir

No	Uraian	Jumlah
1.	S-3 (Doktor)	1
2.	S-2 (Magister)	17
3.	S-1 / D-4 (Sarjana)	18
4.	D-3 Akademi	4
5.	SMU / SMK / MA	7
6.	SMP / MTS	2
7.	SD	1
	Jumlah	50

Sumber : BAPERLITBANG Tahun 2025, diolah

- c. Pegawai berdasarkan bidang/tempat kerja

Tabel 1.3.
Komposisi per bidang

No	Uraian	Jumlah
1.	Sekretariat	20
2.	Bidang Fisik dan Prasarana	7
3.	Bidang Sosial dan Budaya	9

No	Uraian	Jumlah
4.	Bidang Ekonomi	6
5.	Bidang Litbang dan PP	8
	Jumlah	50

Sumber : BAPERLITBANG Tahun 2025, diolah

2. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi didukung oleh sarana dan prasarana kantor, sebagai berikut :

a. Prasarana Gedung Kantor

Tabel 1.4.
Ketersediaan Prasarana Gedung Kantor

No	Uraian	Jumlah
1.	Ruang Kerja / Bidang / Sekt	6
2.	Ruang Rapat	3
3.	Ruang Perpustakaan	1
4.	Lobby (<i>Front Office</i>)	1
5.	Tempat Parkir	2
6.	Halaman	1
7.	Gudang	2
8.	Kamar Mandi	9
9.	Ruang Laktasi	1

Sumber : BAPERLITBANG, 2025, diolah

b. Sarana Gedung

Tabel 1.5.
Ketersediaan Perlengkapan Gedung Kantor

No	Uraian	Satuan	Jumlah
1.	Sound Sistem Ruang	set	3
2.	Sound Sistem Mobile	set	1
3.	AC (ruang kerja dan sidang)	unit	26
4.	Meja Kursi (ruang kerja)	ruang	45
5.	Meja Kursi (ruang sidang)	ruang	72
6.	Listrik	KWH	33.000
7.	Telepon	line	1
8.	Intercome	line	9
9.	Internet	kb	200
10.	Alat Pemadam Kebakaran	unit	2
11.	Genset	unit	1

Sumber : BAPERLITBANG, 2025, diolah

c. Kendaraan Dinas

Tabel 1.6.
Ketersediaan Kendaraan Dinas

No	Uraian	Satuan	Jumlah
1.	Mobil	unit	9
2.	Sepeda motor	unit	14
	Jumlah	unit	23

d. Peralatan

Tabel 1.7.
Ketersediaan Peralatan Kantor

No	Uraian	Satuan	Jumlah
1.	Komputer / PC	unit	24
2.	Laptop	unit	26
3.	Note book	unit	13
4.	Printer	unit	33
5.	Scanner	unit	1
6.	Kamera / Videocam	unit	4
7.	LCD Proyektor	unit	3

Sumber : BAPERLITBANG Tahun 2025

3. Guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi didukung maka perlu disediakan anggaran yang termuat dalam Perubahan APBD tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 1.8.
Anggaran pada Perubahan APBD tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERUBAHAN RENJA 2025
		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	9.736.120.412
	05.01.00	PERENCANAAN	8.871.008.962
1	05.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.873.629.812
	5.01.01.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	79.260.000
	5.01.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	64.781.000
	5.01.01.201.04	Koordinasi dan penyusunan DPA – SKPD	4.000.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERUBAHAN RENJA 2025
	5.01.01.201.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000
	5.01.01.201.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.479.000
	5.01.01.202	Administratif keuangan Perangkat Daerah	5.171.003.462
	5.01.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.141.035.962
	5.01.01.202.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	25.367.500
	5.01.01.202.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.600.000
	5.01.01.203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.850.000
	5.01.01.203.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.850.000
	5.01.01.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	209.733.000
	5.01.01.205.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2.989.000
	5.01.01.205.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4.462.000
	5.01.01.205.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	200.000.000
	5.01.01.205.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	2.282.000
	5.01.01.206	Administratif Umum Perangkat Daerah	189.540.950
	5.01.01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.527.000
	5.01.01.206.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.295.250
	5.01.01.206.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.685.000
	5.01.01.206.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	1.000.000
	5.01.01.206.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000
	5.01.01.206.07	Penyediaan Bahan/Material	25.307.200
	5.01.01.206.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	11.000.000
	5.01.01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	106.676.500
	5.01.01.206.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6.300.000
	5.01.01.206.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4.750.000
	5.01.01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	609.742.000
	5.01.01.207.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	310.732.000
	5.01.01.207.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	249.710.000
	5.01.01.207.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
	5.01.01.207.05	Pengadaan Mebel	49.300.000
	5.01.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	243.900.000
	5.01.01.208.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21.000.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERUBAHAN RENJA 2025
	5.01.01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	171.600.000
	5.01.01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	51.300.000
	5.01.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	367.600.400
	5.01.01.209.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	194.430.400
	5.01.01.209.06	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	41.170.000
	5.01.01.209.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	132.000.000
2	05.01.02	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	868.510.300
	5.01.02.201	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	777.730.400
	5.01.02.201.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	777.730.400
	5.01.02.202	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	25.319.000
	5.01.02.202.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	25.319.000
	5.01.02.203	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	65.460.900
	5.01.02.203.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	6.262.150
	5.01.02.203.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	59.198.750
3	05.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.128.868.850
	5.01.03.201	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	402.310.700
	5.01.03.201.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	212.820.400
	5.01.03.201.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	78.229.900
	5.01.03.201.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	22.849.950
	5.01.03.201.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	88.410.450
	5.01.03.202	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	395.048.500
	5.01.03.202.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	135.444.500
	5.01.03.202.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	23.860.200

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERUBAHAN RENJA 2025
	5.01.03.202.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	235.743.800
	5.01.03.203	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	331.509.650
	5.01.03.203.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	104.729.000
	5.01.03.203.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	19.936.400
	5.01.03.203.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	206.844.250
	05.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	865.111.450
4	05.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	865.111.450
	5.05.02.201	Penelitian dan Pengembangan bidang Penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	27.645.000
	5.05.02.201.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	27.645.000
	5.05.02.204	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	837.466.450
	5.05.02.204.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	837.466.450

Sumber : BAPERLITBANG Tahun 2025

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk Baperlitbang Tahun 2025 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang penyusunan laporan, isu strategis yang memengaruhi kinerja OPD, dukungan sumber daya, sistematika penulisan, serta tindak lanjut evaluasi SAKIP 2025 dan langkah perbaikan internal sebagai upaya peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kinerja secara berkelanjutan.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan dasar kebijakan, peran, tugas, dan tujuan strategis BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar dalam mendukung tata pemerintahan yang berkualitas melalui perencanaan, penelitian, dan

pengembangan, sebagai landasan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Isu-isu Strategis

Menjelaskan tantangan isu strategis BAPERLITBANG di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan dalam memperkuat koordinasi dokumen perencanaan berbasis data yang akurat serta mendorong implementasi kebijakan daerah berbasis riset dan inovasi.

1.3. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Mengemukakan kondisi pegawai, sarana dan prasarana kantor serta anggaran yang dikelola

1.4. Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang digunakan dalam laporan ini

1.5. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2004

Menjelaskan tindak lanjut atas rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2004 BAPERLITBANG melalui monitoring dan evaluasi berkala, penyempurnaan SOP, reviu laporan kinerja oleh Inspektorat, serta optimalisasi penggunaan aplikasi SMART SAKIP, yang seluruhnya telah dilaksanakan.

1.6. Langkah Perbaikan Internal OPD

Menjelaskan Langkah-langkah perbaikan internal sebagai hasil tindak lanjut atas rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2024.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini disusun untuk menjelaskan arah dan komitmen kinerja OPD Tahun 2025 melalui penetapan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan, perjanjian kinerja, serta instrumen pendukung guna memastikan pelaksanaan dan pengukuran kinerja berjalan konsisten dan terukur.

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Mengemukakan tujuan, sasaran dan indikator kinerjanya pada BAPPERIDA

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Menjelaskan Strategi dan arah kebijakan Baperlitbang dalam 3 tahun yaitu 2024 – 2026

2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Menampilkan daftar Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang dilaksanakan Baperlitbang tahun 2025.

2.4. Perjanjian Kinerja tahun 2025

Menampilkan Perjanjian Kinerja Baperlitbang baik pada penetapan maupun perubahan anggaran 2025

2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Mengemukakan instrumen pendukung capaian kinerja dengan aplikasi SMARTSAKIP

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini memaparkan capaian kinerja organisasi berdasarkan indikator yang ditetapkan, realisasi anggaran sebagai dukungan sumber daya keuangan, inovasi untuk meningkatkan efektivitas layanan dan kinerja, serta penghargaan sebagai pengakuan atas prestasi, peningkatan kualitas OPD.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Menampilkan tabel - tabel capaian kinerja tahun dibandingkan dengan target kinerja maupun capaian kinerja tahun lalu.

3.2. Realisasi Anggaran

Menyajikan tabel realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025

3.3. Penghargaan

Menampilkan penghargaan yang diterima Baperlitbang tahun 2025

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merangkum pelaksanaan dan capaian kinerja OPD selama Tahun 2025. Selanjutnya disampaikan rekomendasi sebagai saran perbaikan dan langkah tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja serta kualitas akuntabilitas pada periode berikutnya.

4.1. Kesimpulan

Mengemukakan kesimpulan dari hasil analisis atas realisasi dan capaian kinerja Baperlitbang tahun 2025 beserta permasalahan yang ada.

4.2. Rekomendasi

Menjelaskan rekomendasi yang harus dilakukan oleh Baperlitbang untuk peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2024

Tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2024 tersusun dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.9.
Matriks Tindak Lanjut LHE SAKIP Baperlitbang 2024

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Status / Progres Penyelesaian
1	Memastikan target kinerja tahun berjalan tercapai dengan cara melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan rencana aksi	a. Monitoring dan Evaluasi : ➤ Mingguan : Rapat koordinasi mingguan pejabat struktural Baperlitbang ➤ Bulanan : Rapat koordinasi pejabat struktural Baperlitbang Rapat Koordinasi semua pegawai Baperlitbang (kondisional) ➤ Tribulan : Rapat koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (Rakor POK) semua OPD dipimpin Bupati Karanganyar	➤ Kepala Baperlitbang ➤ Pejabat struktural ➤ Semua pegawai/staf	Sudah dilaksanakan
		b. Pelaporan Capaian Kinerja : Bulanan : Input Progres Capaian Kinerja dan Anggaran di Aplikasi Smartsakip	➤ Admin Smartsakip ➤ Sekretariat ➤ Semua bidang	Sudah dilaksanakan
		c. Pelaporan Laporan Kinerja Tahunan : Penyusunan dan penyampaian : ➤ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	➤ Tim Penyusun Laporan Kinerja/ Pelaksanaan Tugas	Sudah dilaksanakan

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Status / Progres Penyelesaian
		➤ Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT)		
2	Memperbaiki atau menyempurnakan SOP/pedoman teknis, pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja, agar tetap melakukan perbaikan melalui koordinasi dengan Bagian Organisasi	Menyusun SOP : ➤ Pengumpulan data kinerja ➤ Pengukuran capaian kinerja ➤ Berkoordinasi dengan Bagian Organisasi dalam pengumpulan data, pengukuran dan pelaporan capaian kinerja Baperlitbang	➤ Kepala Baperlitbang ➤ Tim Penyusun SOP	Sudah dilaksanakan
3	Mengajukan permintaan revidi laporan kinerja tahunan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar sebelum ditetapkan	➤ Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ➤ Membuat surat permohonan revidi LKjIP kepada Inspektorat Daerah, yaitu surat Nomor 000.7.2/25/II/2025 tanggal 20 Februari tahun 2025 perihal Permohonan revidi LKjIP Baperlitbang 2024	➤ Kepala Baperlitbang ➤ Tim Penyusun LKjIP	Sudah dilaksanakan
4	Menggunakan aplikasi SMART SAKIP Kabupaten Karanganyar secara lebih optimal	Baperlitbang Bersama dengan semua Perangkat Daerah di Kabupaten Karanganyar telah menggunakan aplikasi SMARTSAKIP dalam pelaporan capaian kinerja dan anggaran setiap bulannya	➤ Kepala Baperlitbang ➤ Admin SMARTSAKIP	Sudah dilaksanakan

1.6 Langkah Perbaikan Internal Baperlitbang

Sebagai tindak lanjut atas LHE SAKIP Tahun 2024, Baperlitbang melakukan perbaikan internal untuk memperkuat perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja. Langkah-langkah berikut disusun untuk memastikan pengendalian kinerja lebih tertib dan hasilnya lebih terukur.

1. Penguatan monitoring dan evaluasi (monev) rencana aksi
 - Rapat koordinasi mingguan pejabat struktural untuk memantau progres dan menyelesaikan kendala lebih cepat.
 - Rapat koordinasi bulanan pejabat struktural serta rapat koordinasi seluruh pegawai (kondisional) untuk menjaga konsistensi pelaksanaan target.
 - Mengikuti Rakor POK triwulanan tingkat kabupaten sebagai bagian dari pengendalian kinerja lintas OPD.
2. Penertiban pelaporan kinerja dan anggaran
 - Melakukan input progres capaian kinerja dan anggaran setiap bulan pada aplikasi SMARTSAKIP dengan melibatkan admin, sekretariat, dan seluruh bidang.
3. Penyusunan laporan kinerja tahunan yang tertib
 - Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan berupa LKjIP dan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) melalui tim penyusun.
4. Penyempurnaan SOP dan penguatan tata kelola data kinerja
 - Menyusun SOP pengumpulan data kinerja dan SOP pengukuran capaian kinerja.
 - Melakukan koordinasi dengan Bagian Organisasi dalam pengumpulan data, pengukuran, dan pelaporan capaian kinerja.
5. Quality control laporan melalui reviu Inspektorat
 - Mengajukan permintaan reviu LKjIP kepada Inspektorat sebelum ditetapkan, termasuk menyiapkan surat permohonan reviu (contoh: Nomor 000.7.2/25/II/2025 tanggal 20 Februari 2025).
6. Optimalisasi pemanfaatan SMARTSAKIP
 - Menggunakan SMARTSAKIP secara lebih optimal untuk pelaporan capaian kinerja dan anggaran setiap bulan.

Dengan langkah-langkah tersebut, Baperlitbang diharapkan dapat meningkatkan konsistensi pelaksanaan SAKIP, memperkuat kualitas data dan pelaporan, serta mendorong perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan perbaikan ini akan terus dipantau dan disempurnakan pada periode berikutnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Tujuan strategis BAPERLITBANG adalah Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi., dengan 3 sasaran strategis yaitu :

- 1) Meningkatnya kualitas tata laksana pemerintahan
- 2) Meningkatnya kualitas perencanaan daerah dan penganggaran
- 3) Meningkatnya kualitas penelitian, pengembangan dan inovasi daerah.

Pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah ditunjukkan dengan capaian target indikator kinerja utama (IKU) OPD yang telah ditentukan, di setiap tahunnya,

Tabel 2.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPERLITBANG

No	Tujuan	Indikator	Satuan	Target		
				2024	2025	2026
1	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Nilai	72	73	75
	Sasaran					
1.1	Meningkatnya kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP	Nilai	74	74	75
1.2	Meningkatnya kualitas perencanaan daerah dan penganggaran	Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	Baik	Baik	Baik
1.3	Meningkatnya kualitas penelitian, pengembangan dan inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	Inovatif	Inovatif	Inovatif

Sumber : Renstra Baperlitbang, 2023

Indikator kinerja utama (IKU) OPD inilah yang akan dijadikan sebagai Perjanjian Kinerja antara Kepala Baperlitbang dengan Bupati, setiap tahunnya. Dalam rangka mencapai atau mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah tersebut pada tahun 2025 telah direncanakan Program, Kegiatan dan Subkegiatan dan rencana alokasi anggaran dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Baperlitbang Tahun 2025. Sedangkan alokasi

anggaran yang diterima oleh Baperlitbang pada Perubahan APBD Kabupaten Karanganyar tahun 2025 sebesar Rp. 9.736.120.412,00

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

2.2.1. Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dilakukan melalui penerapan strategi, kebijakan, dan program yang saling mendukung. Strategi dipahami sebagai langkah-langkah menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan perencanaan strategis, berupa penetapan program dan rangkaian kegiatan dengan memperhatikan sumber daya serta kondisi lingkungan yang ada. Sementara itu, kebijakan merupakan ketentuan dari pihak berwenang yang menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan agar berjalan lancar dan bersinergi, dengan strategi yang dapat disusun sesuai kebutuhan tiap sasaran dan dapat pula mendukung lebih dari satu sasaran.

Berdasarkan uraian di atas Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan Daerah : Meningkatkan Daya Saing Daerah			
Sasaran Daerah : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	1. Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	1. Meningkatkan kapasitas dan integritas pegawai Baperlitbang 2. Meningkatkan pemenuhan pengelolaan dan pemanfaatan sarpras secara efektif dan efisien;	1. Meningkatkan pemerintahan yang akuntabel efesien dan efektif di fokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pengelolaan aset Baperlitbang

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		3. Meningkatkan tertib administrasi tata kelola perkantoran	
	2. Meningkatkan kualitas perencanaan daerah dan penganggaran	1. Meningkatkan keselarasan dan konsistensi dokumen perencanaan pusat, provinsi dan kabupaten. 2. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan mitra Baperlitbang 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan; 4. Meningkatkan pengelolaan data dan informasi dalam perencanaan pembangunan	1. Pemanfaatan data yang akurat, terbaru, dan terintegrasi untuk perencanaan dan Monev Kinerja 2. Penguatan kompetensi SDM untuk analisis dan interpretasi data sebagai input perencanaan kebijakan pembangunan 3. Penyusunan standar perencanaan, monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan daerah dan OPD 4. Pemberian ruang yang lebih luas pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan
	3. Meningkatkan kualitas penelitian, pengembangan dan inovasi daerah	1. Meningkatkan Kerja sama penelitian dan pengembangan di daerah; 2. Meningkatkan dan mendorong peran masyarakat dalam berkreasi	1. Peningkatan pengelolaan data dan informasi; 2. Peningkatan kualitas penelitian dan Inovasi 3. Peningkatan hasil kajian dan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		dan berinovasi	inovasi yang diimplementasikan menjadi kebijakan daerah 4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan teknologi tepat guna 5. Peningkatan kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan ;

Sumber : Baperlitbang, 2025

Strategi dan Arah Kebijakan Baperlitbang Tahun 2024-2026 dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas dan integritas pegawai Baperlitbang – Upaya ini diarahkan untuk memperkuat karakter, kompetensi, dan integritas pegawai melalui pembinaan, berbagai kegiatan peningkatan kapasitas, serta penguatan kebersamaan internal dan dengan mitra kerja.
2. Meningkatkan pemenuhan, pengelolaan dan pemanfaatan sarpras secara efektif dan efisien – Langkah ini dilakukan dengan menyediakan, mengelola, dan menggunakan sarana prasarana kerja secara tepat guna melalui pengadaan, pengelolaan aset yang jelas, serta pemeliharaan rutin.
3. Meningkatkan tertib administrasi tata kelola perkantoran – Fokus kegiatan ini adalah menata administrasi dan kearsipan, termasuk peralihan bertahap dari dokumen kertas ke sistem elektronik yang tetap sah sebagai bukti pertanggungjawaban.
4. Meningkatkan keselarasan dan konsistensi dokumen perencanaan pusat, provinsi dan kabupaten – Poin ini menekankan penyelarasan

perencanaan kabupaten dengan rencana nasional dan provinsi melalui pemahaman indikator pembangunan serta penggunaan dokumen acuan yang lebih tinggi.

5. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan mitra Baperlitbang – Pelaksanaan poin ini mengutamakan kerja sama yang kompak dengan OPD dan mitra melalui koordinasi, pendampingan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi agar dokumen perencanaan lebih realistis dan terukur.
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan – Penguatan partisipasi masyarakat dilakukan melalui sosialisasi dan kanal penyampaian usulan yang disertai validasi dan verifikasi agar aspirasi lebih terarah, sesuai prioritas, dan tepat sasaran.
7. Meningkatkan pengelolaan data dan informasi dalam perencanaan pembangunan – Pengelolaan data diperkuat dengan penyediaan data yang valid, mutakhir, konsisten, dan berkelanjutan melalui inventarisasi serta penguatan kelembagaan pengolah data untuk mendukung perencanaan dan litbang daerah.
8. Meningkatkan kerjasama penelitian dan pengembangan di daerah – Kerja sama litbang ditingkatkan melalui inventarisasi, koordinasi, dan perumusan kebutuhan riset daerah agar hasil penelitian lebih terkelola serta dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan.
9. Meningkatkan dan mendorong peran masyarakat dalam berkreasi dan berinovasi – Pendorongan kreativitas dan inovasi masyarakat dilakukan melalui lomba, pemanfaatan teknologi informasi, dan penguatan nilai tambah potensi serta produk lokal untuk mendukung pembangunan daerah.

2.2.2. Arah Kebijakan

Pencapaian tujuan dan sasaran dengan 9 strategi tersebut, perlu untuk di atur dalam pelaksanaannya dengan mempertimbangkan keadaan, potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh

BAPERLITBANG. Pelaksanaan 9 strategi tersebut dibagi dalam 3 tahun yaitu tahun 2024, 2025, 2026 dengan memprioritaskan strategi-strategi yang harus didahulukan/diprioritaskan, dalam bentuk arah kebijakan tahunan.

Memperhatikan arah kebijakan daerah Tahun 2025 dan memperhatikan rencana strategis perangkat daerah, BAPERLITBANG mengambil Arah Kebijakan Tahun 2025 “Penguatan tata kelola perencanaan pembangunan melalui peningkatan penggunaan informasi teknologi dan komunikasi secara efektif dan efisien” Arah kebijakan ini akan ditindaklanjuti dengan :

1. Peningkatan sinergitas aplikasi tata kelola pemerintahan menuju smartcity;
2. Peningkatan pemanfaatan hasil penelitian sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah;
3. Pemantapan koordinasi dan komunikasi dengan Perangkat Daerah dan Swasta;
4. Peningkatan kreativitas dan inovasi pemerintah, masyarakat dan swasta;
5. Pelaksanaan secara rutin koordinasi, konsolidasi, monitoring dan evaluasi kegiatan OPD

2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Strategi dan arah kebijakan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan tahun 2025 perlu dijabarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Tabel 2.3.
Program, Kegiatan dan Subkegiatan

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
A.	URUSAN : PERENCANAAN

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b.	Koordinasi dan penyusunan DPA – SKPD
c.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
d.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.	Administratif keuangan Perangkat Daerah
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD
c.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
a.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
a.	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
b.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
c.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
d.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
5.	Administratif Umum Perangkat Daerah
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
d.	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
e.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
f.	Penyediaan Bahan/Material
g.	Fasilitas Kunjungan Tamu
h.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
i.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
j.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
a.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
c.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
d.	Pengadaan Mebel
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
b.	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya
c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
II.	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
1.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
a.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
2.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
a.	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
3.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
a.	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
b.	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
III.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
1.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
a.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
b.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
c.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
d.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
2.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
a.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
b.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
c.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
3.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
a.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
b.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
c.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
B.	URUSAN : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
IV.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1.	Penelitian dan Pengembangan bidang Penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan
a.	Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan
2.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi
a.	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja secara lebih rinci dinyatakan dalam bentuk lampiran Pejanjian Kinerja Pegawai yang ditandatangani oleh pegawai dan atasan langsung. Secara singkat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Perjanjian Kinerja Baperlitbang tahun 2025 (Penetapan)

No	Tujuan	Indikator	Satuan	Target
1	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Nilai	73
	Sasaran			
1.1	Meningkatnya kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP	Nilai	74
1.2	Meningkatnya kualitas perencanaan daerah dan penganggaran	Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	Baik
1.3	Meningkatnya kualitas penelitian, pengembangan dan inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	Inovatif

Tabel 2.5.
Perjanjian Kinerja Baperlitbang tahun 2025 (Perubahan)

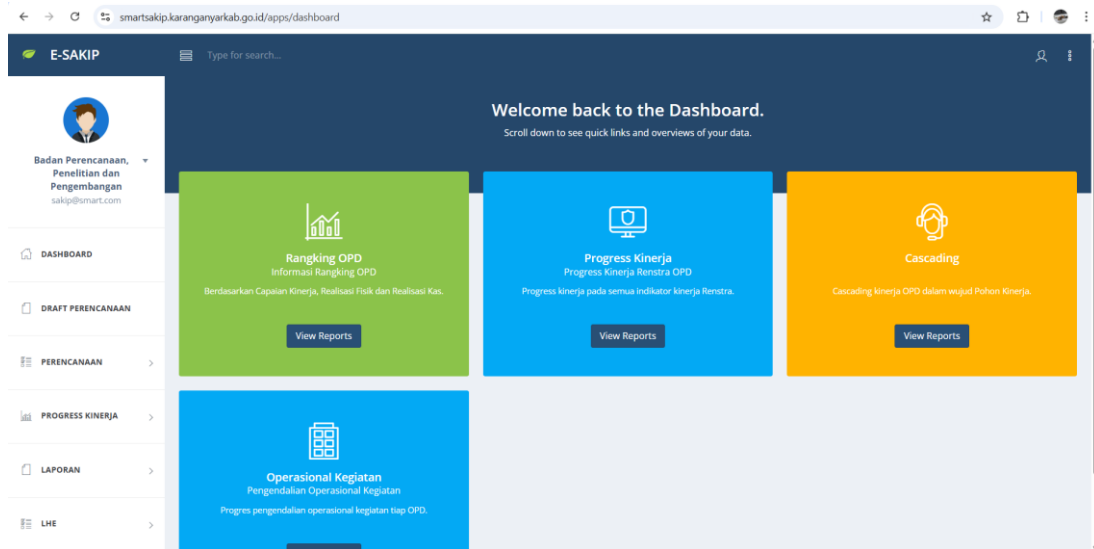
No	Tujuan	Indikator	Satuan	Target
1	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Nilai	86
	Sasaran			
1.1	Meningkatnya kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP	Nilai	74
1.2	Meningkatnya kualitas perencanaan daerah dan penganggaran	Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	Baik
1.3	Meningkatnya kualitas penelitian, pengembangan dan inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	Inovatif

Tabel 2.6.
Indikator Kinerja Program dan Anggaran Baperlitbang tahun 2025

No	Program	Indikator	Target (%)	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	100	6.866.129.812
2	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan program renja PD dengan program RKPD	100	876.010.300
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian program, kegiatan, sub kegiatan antara RKPD dan APBD	94	1.128.868.850
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil kajian yang diimplementasikan menjadi kebijakan daerah	54	865.111.450
		Persentase hasil krenova yang diimplementasikan	51	

2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Untuk menunjang tercapainya kinerja yang optimal serta implementasi SAKIP secara efektif sebagai wujud penerapan prinsip *good governance*, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar perlu memanfaatkan aplikasi pendukung dalam pelaksanaan tugas, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi kinerja SKPD. Instrumen pendukung tersebut dapat diakses melalui laman yang telah disediakan, yaitu <https://smartsakip.karanganyarkab.go.id/>.



Gambar 2.1 Dashboard SMARTSAKIP Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar tahun 2025 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan tahun 2025. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan merupakan kinerja tahun ke-2 dan terakhir pada periode Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 2024 – 2026.

Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 99,17% yang dihitung dari rata-rata seluruh sasaran strategis.

Penilaian capaian kinerja setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi skala nilai dan kriteria penilaian kinerja organisasi yang dilaporkan dalam bentuk *outcome*, berdasarkan PermenPANRB Nomor 22 Tahun 2024. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja.

Tabel 3.1.
Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Capaian Kinerja	Kategori
1.	> 100%	Istimewa
2.	≥85 – 100%	Baik
3.	≥60 – 85%	Butuh Perbaikan
4.	≥20 - 60%	Kurang
5.	<20%	Sangat Kurang

3.1.1. Kinerja sasaran strategis dan Program (perbandingan target dan realisasi)

Analisis capaian kinerja pada bagian ini adalah membandingkan target indikator sasaran strategis organisasi dengan realisasinya, pada tahun 2025, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2.
Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Skala	Sumber Data
1.	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi Daerah	86	85,58	99,51	Baik	Hasil penilaian Kemenpan RB
2.	Meningkatnya kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	74	71,90	97,16	Baik	LHE SAKIP 2024
3.	Meningkatnya kualitas perencanaan daerah dan penganggaran	Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Baik	Baik	100	Baik	Hasil penilaian Kemen dagri
4.	Meningkatnya kualitas penelitian, pengembangan dan inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Inovatif	Inovatif	100	Baik	Hasil penilaian Kemen dagri
Rata-rata					99,17		

Sumber : Baperlitbang Tahun 2025, diolah

Berdasarkan tabel capaian kinerja sasaran strategis diatas dapat diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Pada sasaran meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi, indikator Indeks Reformasi Birokrasi Daerah menunjukkan realisasi 85,58 dari target 86 atau

capaian 99,51% dengan kategori Baik, yang mengindikasikan pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan sangat mendekati target dan relatif stabil.

2. Sasaran selanjutnya yaitu meningkatnya kualitas tata laksana pemerintahan dengan indikator Nilai SAKIP OPD menggunakan hasil penilaian evaluasi SAKIP tahun 2024 karena hasil evaluasi untuk tahun 2025 belum dirilis. Hasil perhitungan capaian kinerja diperoleh angka 97,16% dari realisasi tahun 2024 sebesar 71,90. Meskipun belum mencapai target yang ditetapkan tapi hasil tersebut masih masuk kategori Baik
3. Pada sasaran meningkatnya kualitas perencanaan daerah dan penganggaran, indikator Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah mencapai 100% (target Baik dan realisasi Baik) dengan kategori Baik, yang menunjukkan tata kelola pengelolaan keuangan daerah telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
4. Selanjutnya pada sasaran meningkatnya kualitas penelitian, pengembangan dan inovasi daerah, indikator Indeks Inovasi Daerah juga mencapai 100% (target Inovatif dan realisasi Inovatif) dengan kategori Baik, yang menggambarkan capaian inovasi daerah telah sesuai harapan.

3.1.2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya.

Analisis capaian kinerja pada bagian ini adalah membandingkan realisasi dan kinerja indikator sasaran strategis dan program organisasi pada tahun 2025 dengan capaian tahun sebelumnya (2024), sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3.
Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024 dan 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi Daerah	72	85,74	119%	86	85,58	99,5
2.	Meningkatnya kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	72	71,90	99,86	74	71,90 *)	97,16
3.	Meningkatnya kualitas perencanaan daerah dan penganggaran	Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Baik	Baik	100	Baik	Baik	100
4.	Meningkatnya kualitas penelitian, pengembangan dan inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Inovatif	Inovatif	100	Inovatif	Inovatif	100

Sumber Baperlitbang Tahun 2025, diolah

Keterangan :

*) : hasil penilaian LHE SAKIP tahun 2024

Berdasarkan perbandingan target dan realisasi tahun 2024–2025 pada 4 sasaran strategis, terlihat bahwa capaian kinerja secara umum stabil dan tetap berada pada tingkat baik, meskipun terdapat variasi pada beberapa indikator. Pada indikator Indeks Reformasi Birokrasi Daerah, capaian tahun 2024 tercatat 119% (realisasi 85,74 dari target 72) sedangkan pada tahun 2025 capaian menjadi 99,5% (realisasi 85,58 dari target 86). Penurunan capaian ini terjadi karena target IRB tahun 2025 direvisi menjadi 86 mengacu pada realisasi IRB tahun 2024.

Pada indikator Nilai SAKIP OPD, capaian tahun 2024 mencapai 99,86% (realisasi 71,90 dari target 72). Untuk tahun 2025 dikarenakan nilai SAKIP belum dirilis oleh Inspektorat Daerah Kabupaten

Karanganyar maka dalam analisis ini menggunakan nilai SAKIP tahun 2024 yaitu 71,90. Angka itu menghasilkan capaian kinerja sebesar 97,16% dari target tahun 2025 yaitu 74, menurun apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2024.

Adapun indikator Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dan Indeks Inovasi Daerah menunjukkan kinerja yang konsisten pada tahun 2024 dan 2025, dengan target dan realisasi sama-sama berada pada kategori Baik dan Inovatif serta capaian 100% pada kedua tahun, yang mengindikasikan keberlanjutan kinerja pada aspek pengelolaan keuangan daerah maupun inovasi daerah.

Perbandingan kinerja sasaran strategis Baperlitbang hanya menyajikan data tahun 2024 dan 2025, sedangkan tahun 2023 tidak disajikan karena indikator tujuan dan sasaran strategisnya berbeda. Tujuan dan sasaran strategis Baperlitbang tahun 2024 dan 2025 mengacu pada Rencana Strategis Baperlitbang tahun 2024 – 2026, sedangkan di tahun 2023 mengaju pada Perubahan Rencana Strategis Baperlitbang tahun 2018 – 2023.

3.1.3. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah.

Tabel 3.4.
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025 dan Target 2026 (Akhir RPD)

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Realisasi 2025	Target 2026	Tingkat Kemajuan (%)
1.	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi Daerah	85,58	86	99,51
2.	Meningkatnya kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	71,90 *)	75	95,86
3.	Meningkatnya kualitas perencanaan daerah dan penganggaran	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Baik	Baik	100

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Realisasi 2025	Target 2026	Tingkat Kemajuan (%)
4.	Meningkatnya kualitas penelitian, pengembangan dan inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Inovatif	Inovatif	100

Sumber : Baperlitbang, 2025

Keterangan :

*) : hasil penilaian LHE SAKIP tahun 2024

Berdasarkan tabel tingkat kemajuan antara realisasi tahun 2025 dan target tahun 2026 pada 4 sasaran, dapat disimpulkan bahwa 2 indikator telah menunjukkan kemajuan yang sesuai karena realisasi 2025 sudah berada pada level yang sama dengan target 2026, 2 indikator belum tercapai. Pada indikator Indeks Reformasi Birokrasi Daerah, realisasi tahun 2025 sebesar 85,58 masih berada sedikit di bawah target tahun 2026 yaitu 86, dengan tingkat kemajuan sebesar 99,51%. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan langkah reformasi birokrasi agar peningkatan nilai dapat terpenuhi pada periode target berikutnya.

Adapun indikator Nilai SAKIP OPD tahun 2025 belum dirilis, maka menggunakan data hasil penilaian SAKIP tahun 2024 sebesar 71,90. Apabila dibandingkan dengan target 2026 sebesar maka diperoleh tingkat kemajuan sebesar 95,86%.

Pada indikator Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, realisasi tahun 2025 dan target tahun 2026 sama-sama berada pada kategori Baik, sehingga tingkat kemajuan dinilai tercapai dan menggambarkan konsistensi kualitas tata kelola pengelolaan keuangan daerah. Demikian pula pada indikator Indeks Inovasi Daerah, realisasi tahun 2025 telah berada pada kategori Inovatif yang sama dengan target tahun 2026, sehingga tingkat kemajuan dinilai tercapai dan menggambarkan keberlanjutan capaian inovasi daerah.

3.1.4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/regional.

Berikut ini adalah tabel perbandingan realisasi kinerja Baperlitbang tahun 2025 dengan standar Kabupaten dan Provinsi. Untuk standar nasional tidak dapat dianalisis karena tidak ada data indikator tujuan dan sasaran Baperlitbang skala nasional.

Tabel 3.5.
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025
dengan Standar Provinsi/Nasional

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Realisasi 2025	Standar Provinsi	Standar Nasional	Capaian (%)
1.	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi Daerah	85,58	94,06	-	90,98
2.	Meningkatnya kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	71,90 *)	-	64,89	110,8
3.	Meningkatnya kualitas perencanaan daerah dan penganggaran	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Baik	Baik	-	100
4.	Meningkatnya kualitas penelitian, pengembangan dan inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Inovatif	Sangat inovatif	-	***)

Sumber : Baperlitbang, 2025

Keterangan :

*) : hasil penilaian LHE SAKIP tahun 2024

**) : hasil penilaian SAKIP Kabupaten Karanganyar tahun 2025

***): tidak bisa dihitung karena bukan kuantitatif dan berbeda level realisasinya

Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Daerah pada tahun 2025 menunjukkan realisasi 85,58 dengan capaian 99,51%, yang berarti upaya peningkatan tata pemerintahan melalui agenda Reformasi

Birokrasi telah berjalan sangat baik dan hampir memenuhi target kinerja. Capaian ini mencerminkan adanya penguatan tata kelola melalui penataan proses kerja, penguatan akuntabilitas, serta pemenuhan dokumen dan bukti dukung penilaian yang disusun secara lebih terarah. Meskipun demikian, masih diperlukan peningkatan konsistensi kualitas eviden dan tindak lanjut hasil evaluasi pada seluruh perangkat daerah agar capaian lebih merata dan target dapat terpenuhi sepenuhnya.

Indikator Nilai SAKIP OPD tahun 2024 (hasil penilaian tahun 2025 belum dirilis) mencapai realisasi 71,90 dan melampaui rata-rata nilai SAKIP Kabupaten/kota tahun 2025 yaitu 68,21, dengan capaian 110,8%, yang menunjukkan bahwa penerapan manajemen kinerja di perangkat daerah semakin efektif. Kondisi ini menggambarkan perbaikan pada perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja yang semakin tertib serta lebih selaras antara sasaran, indikator, dan program/kegiatan.

Indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun 2025 berada pada kategori “Baik” dan sesuai dengan Standar Provinsi “Baik”, sehingga capaian kinerjanya tercatat 100%. Hal ini menunjukkan pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan secara tertib sesuai ketentuan, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pengendalian. Walaupun target telah tercapai, konsistensi administrasi keuangan, ketepatan waktu rekonsiliasi dan penyampaian data, serta pemanfaatan hasil evaluasi masih perlu terus diperkuat agar mutu pengelolaan keuangan semakin meningkat dan berkelanjutan.

Indikator Indeks Inovasi Daerah pada tahun 2025 mencapai kategori “Inovatif”, namun masih berada di bawah Standar Provinsi “Sangat inovatif”, sehingga capaian persentase pada tabel tidak dihitung karena indikator dinilai dalam bentuk kategori. Capaian ini menunjukkan bahwa inisiatif inovasi daerah sudah berjalan dan terdokumentasi, namun kualitas, dampak, dan tingkat replikasi inovasi masih perlu ditingkatkan untuk mencapai level yang lebih tinggi. Upaya

perbaikan yang diperlukan mencakup penguatan tata kelola inovasi, standardisasi dokumentasi dan pembuktian manfaat, serta pembinaan dan dukungan yang lebih terarah agar portofolio inovasi meningkat dan mampu memenuhi standar provinsi.

3.1.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja dan solusi

Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan kinerja serta solusi untuk mengatasinya dijabarkan dalam tabel 3.6 di bawah ini.

Tabel 3.6.
Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan Kinerja Dan Solusinya

No	Sasaran	Indikator	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/ kegagalan	Solusi
1.	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi Daerah	86	85,58	99,5	- Capaian IRB 2025 belum mencapai target karena pada RB General masih terdapat kelemahan pada kualitas perencanaan, terutama penetapan target kegiatan/output yang belum konsisten berbasis capaian tahun sebelumnya, relevansi rencana aksi terhadap sasaran, serta dukungan anggaran yang belum memadai. Kondisi tersebut tercermin pada catatan evaluator bahwa sebagian sasaran kegiatan utama belum dikawal rencana aksi yang relevan dan indikator output belum cukup menggambarkan sasaran. - Selain itu, terdapat komponen-komponen pendukung RB General yang nilainya masih menahan kenaikan total, seperti Maturitas SPIP yang menyoroti kualitas sasaran/indikator yang belum SMART dan pengelolaan risiko yang belum memadai, serta	- Perbaikan jangka pendek difokuskan pada penguatan kualitas perencanaan RB General dengan mereviu penetapan target berbasis tren capaian tahun sebelumnya, memastikan rencana aksi relevan untuk mengawal sasaran, menyempurnakan indikator output agar benar-benar menggambarkan sasaran, serta memastikan dukungan anggaran memadai dan efisien. Langkah ini langsung menutup catatan evaluator pada aspek rencana aksi, yang menjadi pengungkit cepat untuk kenaikan skor total. - Perbaikan jangka menengah diarahkan pada komponen yang menahan nilai, yaitu meningkatkan Maturitas SPIP melalui penyusunan cascading sektoral RPJMD 2025–2029, perbaikan sasaran/indikator agar SMART, penguatan manajemen risiko (register risiko dan pemutakhiran RTP) serta

No	Sasaran	Indikator	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/ kegagalan	Solusi
						capaian ZI dan implementasi Arsitektur SPBE yang masih rendah. Pada RB Tematik, tema pengentasan kemiskinan dan realisasi investasi masih dicatat memiliki indikator sasaran yang belum SMART dan rencana aksi yang belum menunjukkan kolaborasi lintas instansi/pentahelix, sementara pada aspek dampak masih ada capaian rendah seperti stunting dan pengendalian inflasi.	penguatan pengendalian korupsi. Pada RB Tematik, perlu penyempurnaan indikator agar SMART dan menunjukkan kolaborasi pentahelix, sekaligus penguatan bukti dampak terutama pada tema yang masih rendah (mis. stunting dan inflasi) dengan penggunaan data acuan yang tepat dan peningkatan kinerja pengendalian sesuai penilaian
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan daerah dan penganggaran	Nilai SAKIP	74	71,90*)	97,16	- Keselarasan sasaran–indikator–program/kegiatan–anggaran pada sebagian perangkat daerah belum konsisten. - Kapasitas perencana/penyusun anggaran belum merata sehingga kualitas analisis dan justifikasi kegiatan bervariasi. - Perubahan kebijakan/penyesuaian prioritas di tengah proses memicu revisi dan mengganggu konsistensi antar dokumen. - Data dukung (baseline, proyeksi, analisis biaya) belum kuat dan	- Menerapkan checklist keterkaitan (logic model) dan revidi substansi lintas bidang sebelum finalisasi dokumen. - Melaksanakan bimbingan teknis/klinik perencanaan–penganggaran terjadwal serta pendampingan pada unit yang nilainya rendah. - Memperkuat manajemen perubahan melalui jadwal penguncian (cut-off) revisi dan pencatatan perubahan terintegrasi dalam sistem.

No	Sasaran	Indikator	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/ kegagalan	Solusi
						seragam sehingga menurunkan kualitas perencanaan. - Analisis ini berdasarkan hasil penilaian SAKIP tahun 2024 karena hasil penilaian SAKIP 2025 belum dirilis	- Melakukan standarisasi data indikator dan penyediaan data dukung oleh unit teknis, disertai validasi serta pemutakhiran rutin.
3.	Meningkatnya kualitas penelitian, pengembangan dan inovasi daerah	Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Baik	Baik	100	Capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Karanganyar tahun 2025 telah memenuhi target dengan memperoleh kategori Baik . Keberhasilan ini menunjukkan pengelolaan keuangan daerah berjalan tertib dan konsisten, didukung oleh perencanaan anggaran yang semakin berkualitas serta kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan. Selain itu, penguatan pengendalian internal dan perbaikan tata kelola pelaksanaan anggaran turut menjaga kinerja pengelolaan keuangan tetap pada kategori yang ditargetkan.	Tindak lanjut yang dilakukan untuk meningkatkan kategori pada tahun berikutnya adalah memperkuat kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, termasuk ketepatan waktu dan ketepatan sasaran belanja. Pemerintah Kabupaten Karanganyar perlu meningkatkan konsistensi pengendalian internal dan evaluasi berkala atas pelaksanaan anggaran agar deviasi dapat dikoreksi lebih cepat. Di samping itu, penguatan kapasitas SDM pengelola keuangan serta pemanfaatan sistem informasi keuangan secara lebih optimal perlu dilakukan agar kinerja IPKD dapat meningkat ke kategori yang lebih tinggi.
4.	Meningkatnya kualitas penelitian,	Indeks Inovasi Daerah	Inovatif	Inovatif	100	Capaian Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Karanganyar tahun 2025	Tindak lanjut untuk meningkatkan kategori ke depan adalah memperkuat

No	Sasaran	Indikator	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/ kegagalan	Solusi
	pengembangan dan inovasi daerah					telah memenuhi target dengan memperoleh kategori Inovatif . Keberhasilan ini menunjukkan adanya komitmen perangkat daerah dalam melahirkan dan menjalankan inovasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Selain itu, dukungan kelembagaan dan proses pengusulan–pendokumentasian inovasi yang semakin tertata turut membantu pencapaian kategori yang ditargetkan.	kualitas inovasi agar lebih berdampak, terukur, dan berkelanjutan, termasuk memastikan setiap inovasi memiliki indikator hasil, baseline, target, serta data capaian yang jelas. Pemerintah Kabupaten Karanganyar perlu mendorong replikasi dan perluasan inovasi yang terbukti efektif lintas perangkat daerah, disertai mekanisme monitoring dan evaluasi yang rutin. Di samping itu, penguatan ekosistem inovasi melalui kolaborasi dengan masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan pemanfaatan teknologi digital perlu ditingkatkan agar IID dapat naik ke kategori yang lebih tinggi yaitu sangat inovatif.

3.1.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.7.
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi Daerah	86	85,58	99,5	9.736.120.412	9.127.548.263	93,75	1,06
2.	Meningkatnya kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	74	71,90 *)	97,16	6.866.129.812	6.304.622.099	91,82	1,06
3.	Meningkatnya kualitas perencanaan daerah dan penganggaran	Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Baik	Baik	100	2.004.879.150	1.973.671.622	98,44	1,02
4.	Meningkatnya kualitas penelitian, pengembangan dan inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Inovatif	Inovatif	100	865.111.450	849.254.542	98,17	1,02

Keterangan :

*) : hasil penilaian LHE SAKIP tahun 2024

Dengan melihat Tabel 3.7 diatas dapat diketahui bahwa semua indikator kinerja tujuan/sasaran yang mempunyai tingkat efisiensi tinggi yaitu diatas 1. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan di Baperlitbang sudah berjalan dengan baik dilihat dari tingkat efisiensi yang tinggi dari masing-masing indikator.

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Daerah sebesar 99,5% dengan serapan anggaran 93,75% menghasilkan tingkat efisiensi 1,06. Hal ini menunjukkan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi relatif hemat sumber daya, namun terdapat selisih kecil dari target (0,42 poin) sehingga perlu penguatan kualitas intervensi agar target dapat tercapai penuh.

Indikator sasaran Nilai SAKIP OPD menggunakan hasil penilaian tahun 2024 sebesar 71,90 dengan capaian kinerja 97,16%. Capaian tersebut menghasilkan tingkat efisiensi 1,06 karena serapan anggaran mencapai 91,82%, yang menunjukkan bahwa dukungan pelaksanaan kegiatan (pendampingan, monitoring dan evaluasi, serta reviu dokumen kinerja) telah berjalan.

Capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 100% dengan serapan anggaran 98,44% menghasilkan tingkat efisiensi 101,58. Hal ini menunjukkan target tercapai dengan penggunaan anggaran yang terkendali serta pelaksanaan kegiatan yang relatif tepat sasaran.

Capaian Indeks Inovasi Daerah sebesar 100% dengan serapan anggaran 98,17% menghasilkan tingkat efisiensi 101,86. Hal ini menunjukkan upaya peningkatan inovasi daerah mampu mencapai target dengan penggunaan sumber daya yang efisien.

3.1.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

Tabel 3.8.
Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak menunjang
1.	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi Daerah	99,51			99,5	
2.	Meningkatnya kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP	71,90 *)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	97,16	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang dapat disusun dalam 1 tahun	100	Menunjang
				Administratif keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran OPD dalam 1 tahun	100	Menunjang
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi (penatausahaan) barang milik daerah	100	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian (ASN dan Non ASN)	100	Menunjang
				Administratif Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum OPD yang dipenuhi	100	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan peralatan dan perlengkapan yang terpenuhi	100	Menunjang

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang OPD yang dipenuhi dalam 1 tahun	100	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang OPD yang dipenuhi dalam 1 tahun	100	Menunjang
3.	Meningkatnya kualitas perencanaan daerah dan penganggaran	Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	100	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan program renja PD dengan program RKPD	100	Menunjang
				Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan dan pendanaan yang dapat disusun dalam 1 tahun	100	Menunjang
				Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase masukan analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan yang dapat disusun dalam 1 tahun	100	Menunjang
				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Laporan pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah yang dapat disusun dalam 1 tahun	100	Menunjang
				Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian program, kegiatan,	105,29	Menunjang

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak menunjang
					subkegiatan antara RKPD dan APBD		
				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Capaian kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100	Menunjang
				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Capaian kegiatan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA	100	Menunjang
				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Capaian kegiatan koordinasi perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	Menunjang
4.	Meningkatnya kualitas penelitian, pengembangan dan inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	100	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil kajian yang diimplementasi kan menjadi kebijakan daerah	114,8	Menunjang
					Persentase hasil krenova yang diimplementasikan	131,3	Menunjang
				Penelitian Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Persentase rencana riset yang dilaksanakan (didanai)	100	Menunjang
				Invensi dan Inovasi	Persentase invensi dan inovasi yang difasilitasi pengembangannya	100	Menunjang

Keterangan :

*) : hasil penilaian LHE SAKIP tahun 2024.

Dari tabel 3.8 diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar program/kegiatan pada tabel dinilai menunjang keberhasilan sasaran karena indikator kegiatannya mencapai 100%, bahkan terdapat yang melampaui target (105,29%, 114,8%, dan 131,3%). Hal ini terlihat pada sasaran IPKD dan Indeks Inovasi Daerah yang sama-sama mencapai 100%, sejalan dengan seluruh kegiatan pendukung yang berstatus *menunjang* dan capaian kegiatannya sangat baik. Dengan demikian, keberhasilan kedua sasaran tersebut dapat dikaitkan dengan pelaksanaan program/kegiatan yang berjalan sesuai rencana dan terarah pada pencapaian indikator sasaran.

Pada sasaran Nilai SAKIP, walaupun menggunakan nilai dari hasil penilaian LHE SAKIP tahun 2024 tetapi hasil perhitungan capaian kinerjanya mencapai 97,16% sehingga *menunjang* terhadap keberhasilan sasaran belum dapat ditetapkan karena realisasi nilai SAKIP belum tersedia, meskipun sebagian besar kegiatan penunjang (perencanaan, administrasi, pengadaan, hingga pemeliharaan) menunjukkan capaian 100%. Kondisi ini menunjukkan dukungan dari sisi pelaksanaan kegiatan telah berjalan, namun keterkaitannya terhadap hasil akhir (nilai SAKIP) belum dapat disimpulkan tanpa data capaian indikator sasaran. Adapun sasaran Indeks Reformasi Birokrasi Daerah mencapai 99,51% (hampir tercapai), sehingga kontribusi program/kegiatan yang mendukungnya telah terlihat, namun masih diperlukan penguatan agar target terpenuhi sepenuhnya.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Pada Perubahan APBD tahun anggaran 2025 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 9.736.120.412,00 yang semuanya bersumber pada Dana Alokasi Umum (DAU). Realisasi anggaran mencapai 93,75% sebesar Rp. 9.127.548.263,00, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 608.572.149,00.

Hasil realisasi anggaran mempengaruhi capaian kinerja sasaran strategis organisasi, dapat dilihat pada tabel 3.9 dibawah ini.

Tabel 3.9.
Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	APBD	REALISASI	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	9.736.120.412	9.127.548.263	93,75
A.	PERENCANAAN	8.878.508.962	8.279.943.721	93,26
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.866.129.812	6.304.622.099	91,82
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	79.260.000	74.663.700	94,20
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	64.781.000	61.802.500	95,40
2)	Koordinasi dan penyusunan DPA – SKPD	4.000.000	4.000.000	100,00
3)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000	3.000.000	100,00
4)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.479.000	5.861.200	78,37
2	Administratif keuangan Perangkat Daerah	5.161.003.462	4.661.639.906	90,15
5)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.141.035.962	4.631.872.406	90,10
6)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	25.367.500	25.367.500	100,00
7)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.600.000	4.600.000	100,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.850.000	2.350.000	82,46
8)	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.850.000	2.350.000	82,46
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	209.733.000	205.476.700	97,97
9)	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2.989.000	2.980.200	99,71
10)	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4.462.000	3.893.650	87,26
11)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	200.000.000	197.746.500	98,87
12)	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	2.282.000	2.250.000	98,60
5	Administratif Umum Perangkat Daerah	192.040.950	178.658.945	94,26
13)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.527.000	7.516.750	99,86
14)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.295.250	10.257.500	99,63

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	APBD	REALISASI	Capaian (%)
1	2	3	4	5
15)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.685.000	12.385.000	90,50
16)	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	1.000.000	999.000	99,90
17)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	3.000.000	100,00
18)	Penyediaan Bahan/Material	25.307.200	25.301.900	99,98
19)	Fasilitas Kunjungan Tamu	11.000.000	10.850.000	98,64
20)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	109.176.500	95.223.795	87,22
21)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6.300.000	6.175.000	98,02
22)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4.750.000	4.750.000	100,00
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	609.742.000	590.253.800	96,80
23)	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	310.732.000	295.600.000	95,13
24)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	249.710.000	245.808.800	98,44
25)	Pengadaan Mebel	49.300.000	48.845.000	99,08
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	243.900.000	227.895.048	93,44
26)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21.000.000	21.000.000	100,00
27)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	171.600.000	155.595.048	90,67
28)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	51.300.000	51.300.000	100,00
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	367.600.400	365.884.000	99,53
29)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	194.430.400	192.848.000	99,19
30)	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	41.170.000	41.130.000	99,90
31)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	132.000.000	131.906.000	99,93
II.	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	876.010.300	869.913.203	99,30
9	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	785.230.400	779.617.027	99,29
32)	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	785.230.000	779.617.027	99,29
10	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	25.319.000	24.877.066	98,25
33)	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	25.319.000	24.877.066	98,25

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	APBD	REALISASI	Capaian (%)
1	2	3	4	5
11	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	65.460.900	65.419.110	99,94
34)	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	6.262.150	6.220.650	99,34
35)	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	59.198.750	59.198.460	100,00
III.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.128.868.850	1.103.758.419	97,78
12	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	402.310.700	390.869.960	97,16
36)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	212.820.400	210.204.800	98,77
37)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	78.229.900	77.983.650	99,69
38)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	22.849.950	22.522.110	98,57
39)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	88.410.450	80.159.400	90,67
13	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	395.048.500	385.392.476	97,56
40)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	135.444.500	132.118.681	97,54
41)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	23.860.200	23.847.300	99,95
42)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	235.743.800	229.426.495	97,32
14	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	331.509.650	327.495.983	98,79
43)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	104.729.000	103.352.950	98,69
44)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	19.936.400	19.829.110	99,46
45)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	206.844.250	204.313.923	98,78
B.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	865.111.450	849.254.542	98,17
IV.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	865.111.450	849.254.542	98,17

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	APBD	REALISASI	Capaian (%)
1	2	3	4	5
15	Penelitian dan Pengembangan bidang Penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	27.645.000	24.635.700	89,11
46)	Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan	27.645.000	24.635.700	89,11
16	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	837.466.450	824.618.842	98,47
47)	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	837.466.450	824.618.842	98,47
	2 urusan 4 Program, 16 Kegiatan, 47 Subkegiatan			

3.3. INOVASI

Pada tahun 2025, Baperlitbang belum menghasilkan inovasi yang dapat dicatat sebagai keluaran perangkat daerah. Pelaksanaan kegiatan masih berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi utama, sehingga belum terdapat terobosan atau pembaruan yang memenuhi kriteria inovasi. Kondisi ini menjadi bahan evaluasi untuk mendorong penguatan budaya kerja inovatif pada tahun berikutnya.

3.4. PENGHARGAAN

Pada tahun 2025 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan mendapatkan penghargaan di tingkat Kabupaten Karanganyar, yaitu Skor SPI Internal Terbaik I.



Gambar 3.1 Sertifikat Penghargaan

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2025 merupakan dokumen yang berisi pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan penganggaran tahun 2025.

Sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan tahun 2024 – 2026 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan dengan Bupati Karanganyar tahun 2025 telah diperoleh hasil akhir dari pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang menunjang pencapaian kinerja dalam Perjanjian Kinerja tersebut.

Dari 4 indikator tujuan dan sasaran yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan tahun 2025 ada 1 indikator yang belum dirilis/keluar hasilnya yaitu Nilai SAKIP OPD yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar, maka dalam analisis capaian kinerjanya menggunakan hasil evaluasi SAKIP tahun 2024..

Tujuan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan yaitu Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi dengan hasil 85,58. Hasil tersebut masih dibawah target yaitu 86, dengan capaian kinerja 99,5% pada level predikat BAIK.

Sasaran 1 yaitu Meningkatnya kualitas tata laksana pemerintahan dengan indikator Nilai SAKIP OPD belum dapat dianalisis karena belum dirilis Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai evaluator SAKIP. Sasaran 2 yaitu Meningkatnya kualitas perencanaan daerah dan penganggaran dengan indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, yang pada tahun 2025 meraih predikat BAIK sehingga memenuhi target. Sasaran 3 yaitu Meningkatnya

kualitas penelitian, pengembangan dan inovasi daerah dengan indikator Indeks Inovasi Daerah, level yang diraih Adalah INOVATIF sesuai target yang telah ditetapkan

Pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan, baik dari sisi pencapaian indikator maupun realisasi anggaran, telah melebihi 90%, tepatnya 93,69%. Dengan membandingkan persentase penggunaan anggaran dan capaian indikator, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan telah berjalan dengan efisien. Dari segi efektivitas, dengan mempertimbangkan jumlah indikator yang mencapai 72 dan tenaga kerja yang tersedia, pelaksanaan kegiatan dapat dikatakan efektif.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperbaiki dan dijadikan bahan evaluasi dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya. Permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Ketidakseimbangan dalam distribusi beban kerja serta ketidakmerataan indikator kinerja, di mana terdapat jabatan dengan tugas yang terlalu berat sementara yang lain memiliki beban kerja yang lebih ringan;
2. Belum adanya kejelasan mengenai penanggung jawab indikator kinerja di tingkat subkoordinator atau kepala subbidang;
3. Diperlukan kejelasan mengenai struktur kinerja serta keterkaitan lintas program dan kegiatan;
4. Tugas dan fungsi masing-masing bidang belum sepenuhnya tercermin dalam indikator yang telah ditetapkan, terutama dalam aspek monitoring dan evaluasi;
5. Indikator yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan perlu diperjelas serta dirumuskan secara akurat agar dapat diukur dengan baik.

4.2. REKOMENDASI

Sebagai koordinator penyusunan rencana pembangunan daerah, BAPERLITBANG memerlukan dukungan serta peran aktif seluruh pihak, khususnya Perangkat Daerah, guna memastikan perencanaan pembangunan

yang berkualitas, realistis, dan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat maupun provinsi. Dalam rangka meningkatkan mutu perencanaan, beberapa langkah yang perlu ditempuh antara lain:

1. Meningkatkan pemahaman bersama di kalangan perencana OPD mengenai indikator, formulasi, serta jenjang indikator agar penyusunan lebih sistematis dan terstruktur. Untuk mendukung hal tersebut, perlu diselenggarakan diklat, bimbingan teknis, atau lokakarya bagi para perencana.
2. Memanfaatkan aplikasi yang tersedia dengan fitur yang lengkap, akurat, dan mudah digunakan, serta mampu menjamin konsistensi dan sinkronisasi dokumen perencanaan di tingkat pusat, provinsi, daerah, maupun OPD. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPDRI) adalah aplikasi yang digunakan dalam proses perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan di semua pemerintah daerah.
3. Melakukan pemerataan distribusi beban kerja pegawai guna menghindari ketimpangan, misalnya pada kondisi ketika satu pegawai harus menangani perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan secara bersamaan.
4. Memperkuat komunikasi internal dan eksternal di lingkungan OPD, mengingat proses perencanaan hingga pelaporan sangat bergantung pada koordinasi yang efektif antarbidang, sekretariat, antar OPD, serta antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

s